

SINERGI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PAPUA

Cornelia Evelin Cabui¹

¹Universitas Musamus Merauke, Jl. Kamizaun, Merauke, Papua Selatan, Indonesia
Email: cornelia@unmus.ac.id

Article History

Received: 09-10-2025

Revision: 16-10-2025

Accepted: 19-10-2025

Published: 21-10-2025

Abstract. Tourism development in the Land of Papua holds strategic potential in driving regional economic growth and improving community welfare, particularly for the Indigenous Papuans (OAP). Data collection techniques were conducted through library research, which involves reviewing relevant literature as a theoretical and contextual basis. The sources of this research data are scientific articles published in various scientific journals and indexed in Google Scholar. Data analysis was carried out qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis results indicate that to ensure inclusive and sustainable development, active involvement of the Papua People's Assembly (MRP) and indigenous communities is required at every stage of tourism investment planning and implementation. An approach based on local uniqueness and the utilization of Geographic Information System (GIS) technology in mapping regional potential and SMEs is key to formulating effective development strategies. Moreover, tourism development policies need to be designed collaboratively with a socio-legal approach that recognizes customary law and the social structures of Papuan society. Cross-agency coordination and the provision of fiscal incentives to investors committed to empowering local communities are expected to create a fair investment climate. Strengthening indicators of local economic impact and implementing the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in tourism projects are important steps in maintaining social and cultural sustainability.

Keywords: Role of MRP, Papuan People's Assembly, Investment, Local Tourism, UMKM, Economic Growth, Collaboration, Synergy

Abstrak. Pengembangan pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji literatur yang relevan sebagai dasar teoritis dan kontekstual. Sumber data penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang terbit pada berbagai Jurnal Ilmiah dan berbasis pada pendindeks *Google Scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan keterlibatan aktif Majelis Rakyat Papua (MRP) dan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan investasi pariwisata. Pendekatan berbasis keunikan lokal dan pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam pemetaan potensi wilayah dan UMKM menjadi kunci dalam menyusun strategi pengembangan yang efektif. Selain itu, kebijakan pembangunan pariwisata perlu dirumuskan secara kolaboratif dengan pendekatan socio-legal yang mengakui hukum adat dan struktur sosial masyarakat Papua. Koordinasi lintas lembaga dan pemberian insentif fiskal kepada investor yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat lokal diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang adil. Penguatan indikator dampak ekonomi lokal dan penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dalam proyek pariwisata menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya.

Kata Kunci: MRP, Majelis Rakyat Papua, Investasi, Pariwisata Lokal, UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Kolaborasi, Sinergi

How to Cite: Cabui, C. E. (2025). Sinergi Peran Majelis Rakyat Papua untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Papua. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (6), 9917-9927. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i6.4350>

PENDAHULUAN

Provinsi Papua dikenal sebagai wilayah di Indonesia bagian Timur yang memiliki potensi keanekaragaman hayati dan kebudayaan. Wilayah geografis yang memiliki bentang alam seperti gunung yang indah, pesisir pantai yang eksotis, hutan tropis yang sangat lebat dan banyaknya flora dan fauna endemik yang ditemukan. Hal ini menjadi modal pengembangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki, sebagaimana (Saweri, David, 2023) bahwa pemanfaatan alam dan budaya sebagai tempat wisata favorit, diantaranya yang cukup terkenal di wilayah Papua yaitu Danau Paniai, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Taman Hutan Raya Raja Ampat, Lembah Baliem, dan Pantai Bosnik. Namun potensi tersebut belum menjadikan masyarakat di Provinsi ini dapat memenuhi kebutuhannya. Beberapa kawasan di Provinsi Papua masih tergolong dalam kategori daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T). Hal ini sejalan dengan data (BPS, 2021) mengenai jumlah desa tertinggal tiap Provinsi di Indonesia menunjukkan Papua memiliki 3.996 jumlah desa sangat tertinggal dan 974 desa tertinggal, jumlah tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

Kawasan 3T masih memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang terjaga. Potensi sumber daya alam yang melimpah bisa dijadikan modal utama pengembangan berbagai sektor yang mendukung kearifan lokal, termasuk bidang pariwisata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadikan suatu daerah bisa dilakukan pengembangan pariwisatanya. Menurut (Heliany, 2019), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi kepariwisataan antara lain kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan regulasi, serta pengembangan partnership. Masih banyak tempat di wilayah Provinsi Papua yang belum sepenuhnya tereksplorasi, sehingga menjadikan daerah ini menarik perhatian calon wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berbeda dengan kekayaan alam dan budaya yang autentik.

Konteks pengembangan wilayah sebagai daerah pariwisata perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Lembaga representasi kultural masyarakat Papua yang memiliki peran sangat signifikan. Masih banyak daerah berpotensi menjadi pusat pariwisata namun belum diberikan hak pembebasan lahan. Sebagaimana yang tertuang pada (DPR, 2021) bahwa salah satu tugas dan wewenang MRP yaitu memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua. Oleh karena itu, MRP memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait pembangunan yang perlu memperhatikan nilai budaya dan hak

masyarakat Papua, termasuk investasi di sektor pariwisata. Upaya mendorong investor khususnya di bidang pariwisata Papua telah dilakukan. Diantaranya Eskak (2021) Pemerintah telah berupaya mengenalkan Papua melalui pelaksanaan kegiatan bergengsi seperti Pekan Olahraga Nasional. Namun hal ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat setempat, karena kebangkitan industri kreatif hanya bertahan selama pagelaran PON Papua XXI. Selain itu, keberadaan UMKM pendukung pada sektor pariwisata juga belum maksimal. Belum terjadi sinergi antara UMKM dan pariwisata untuk mendukung kesejahteraan lokal, diantaranya belum banyak ditemukan penjualan produk lokal di sekitar daerah wisata Papua.

Investasi menjadi semakin penting dan mendesak dalam rangka pengoptimalan potensi daerah untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan model investasi tentunya bisa memantik investor sehingga masyarakat lokal juga terlibat dalam upaya pendayagunaan lingkungan tempat tinggal mereka, sebagaimana (Sriwijaya et al., 2024) bahwa penerapan pendekatan *Community Based Tourism (CBT)* dengan menempatkan masyarakat lokal di Pulau Liki, Papua sebagai pemeran utama pada sektor pariwisata telah dilakukan. Hal ini bisa memperkuat pemahaman masyarakat lokal terhadap potensi daerahnya sehingga terlihat adanya dampak keberlanjutan, meskipun masih diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Integrasi yang berkelanjutan sesuai dengan pemodelan CBT ini juga bisa diimplementasikan di wilayah Papua melalui pemanfaatan pariwisata lokal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan Triyanti et al., (2020) bahwa keterlibatan stakeholder, masyarakat lokal memberikan dampak ekonomi terhadap pariwisata, termasuk manfaat kepada tenaga kerja dan pemilik usaha penjualan makanan, minuman serta kerajinan dari bahan alam. Selain itu, kemudahan pengunjung menuju lokasi wisata melalui ketersediaan informasi mengenai transportasi dan biaya yang diperlukan juga perlu menjadi perhatian utama, sebagaimana Heliany (2019) transportasi termasuk salah satu faktor pendukung perekonomian dan pembangunan daerah, karena destinasi unggulan di Indonesia bisa dipromosikan dengan informasi akurat dan terinci. Integrasi ini tidak hanya mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui layanan pariwisata dan penyediaan produk layak jual, tetapi juga memperkaya wisatawan dengan pengalaman autentik, diantaranya transportasi, produk budaya dan tentunya kuliner khas Papua. Sinergi antar berbagai pihak ini tentunya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk masyarakat Papua.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui analisis kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Wilayah Papua. Berdasarkan hasil penelitian Ismail (2020) bahwa potensi pariwisata di daerah Papua masih dilakukan secara tradisional dan terbatas pada masyarakat pemilik hak ulayat di lokasi wisata, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dan swasta untuk mendorong tersedianya Rencana Induk Pariwisata Papua (RIP Papua). Evaluasi terhadap kebijakan investasi di sektor pariwisata yang telah ada, identifikasi tantangan dan peluang sebelum implementasi model rancangan kebijakan baru, serta formulasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal sebagai upaya responsif mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada sektor pariwisata ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah Papua

METODE

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan studi dokumentasi. Tujuan utama metode ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mendorong ekonomi berbasis identitas melalui pengembangan sektor pariwisata lokal dan UMKM sebagai instrumen akselerasi pertumbuhan ekonomi di Papua. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Metode deskriptif-kualitatif dianggap relevan karena dapat menggambarkan peran kelembagaan adat (MRP), dinamika investasi, serta strategi ekonomi berbasis kearifan lokal. Teori Identitas Sosial (Henri Tajfel, 1981): Menjelaskan bahwa identitas kelompok memengaruhi pola pikir, perilaku, dan orientasi ekonomi masyarakat. Teori Ekonomi Partisipatoris dan Berbasis Komunitas (Bowles & Gintis, 2002): Menekankan pentingnya nilai budaya, solidaritas sosial, dan partisipasi komunitas dalam ekonomi lokal. Teori Pembangunan Daerah (Todaro & Smith, 2015): Menjelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan aktor lokal dalam pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Zed (2004), studi kepustakaan adalah metode sistematis untuk memperoleh data teoritis dan fakta konseptual yang mendukung perumusan masalah dan analisis dalam penulisan ilmiah. Pendekatan ini juga memungkinkan pemanfaatan pengetahuan terdokumentasi untuk membangun argumen dan sintesis yang kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji literatur yang relevan sebagai dasar teoritis dan kontekstual. Sumber data penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang terbit

pada berbagai Jurnal Ilmiah dan berbasis pada pendindeks *Google Scholar*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Tabel 1. Dampak Positif Integrasi Pariwisata & UMKM dengan Peran MRP

Aspek Ekonomi	Dampak Integrasi dengan Peran MRP
Pendapatan Komunitas	Peningkatan penghasilan dari usaha wisata lokal dan produk UMKM
Pelestarian Budaya	Masyarakat tetap mempraktikkan budaya dan adat sebagai aset ekonomi
Kemandirian	Masyarakat tidak tergantung pada investor luar atau hibah negara
Akses Pasar	Produk lokal mendapat pasar melalui wisatawan domestik/internasional
Keadilan Ekonomi	Distribusi keuntungan ekonomi lebih merata ke komunitas

Peran MRP dalam Mendorong CBT di Papua

- **Regulator Kultural:** MRP dapat menetapkan pedoman dan kebijakan yang memastikan bahwa pengembangan pariwisata dan UMKM sejalan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat OAP.
- **Fasilitator Pemberdayaan:** MRP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan UMKM.
- **Mediator Konflik:** Dalam kasus sengketa lahan atau konflik kepentingan, MRP dapat berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Strategi Integrasi Pariwisata Lokal dan UMKM melalui CBT

- **Pengembangan Desa Wisata:** MRP dapat mendorong pembentukan desa wisata berbasis komunitas yang mengintegrasikan atraksi budaya, alam, dan produk UMKM lokal.
- **Peningkatan Kapasitas UMKM:** Melalui pelatihan dan pendampingan, UMKM lokal dapat meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, dan akses pasar.
- **Promosi dan Pemasaran:** MRP dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan destinasi wisata dan produk UMKM Papua ke pasar nasional dan internasional.

Investasi pariwisata di Tanah Papua menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan berbagai inisiatif dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi wisata lokal. Namun, keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua (OAP) menjadi krusial dalam memastikan bahwa investasi tersebut sejalan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat.

Peran MRP dalam Mengawal Investasi Pariwisata

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menekankan pentingnya peran aktif MRP dalam mengawal masuknya investasi di Papua. MRP memiliki kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara pemerintah dan pihak ketiga, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak OAP. Hal ini bertujuan agar investasi yang masuk menghormati adat dan budaya, serta memberdayakan masyarakat lokal. Selain itu, MRP juga memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang mencapai Rp 9,62 triliun. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat guna dan mendukung pembangunan yang inklusif bagi masyarakat Papua.

Pengembangan Pariwisata Lokal dan Tantangannya

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tantangan seperti harga yang kurang terjangkau bagi wisatawan lokal masih menjadi perhatian, sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mengemas produk pariwisata dengan nilai yang terjangkau. Di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, pengembangan desa wisata menjadi fokus utama. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pengembangan desa wisata di wilayah ini, mengingat potensi alam, lingkungan, dan budaya yang dimiliki. Namun, realisasi ini memerlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat.

Aspirasi dan Penolakan Masyarakat Adat

Meskipun ada upaya pengembangan, masyarakat adat di beberapa wilayah menunjukkan penolakan terhadap investasi yang dianggap tidak melibatkan mereka secara langsung. Misalnya, masyarakat adat sub suku Malind Makleuw di Merauke menolak masuknya investasi di wilayah mereka karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Mereka menyampaikan aspirasi ini kepada MRP Papua Selatan, yang mereka anggap sebagai representatif dari OAP. Selain itu, MRP juga menolak investasi yang dianggap merugikan masyarakat, seperti industri minuman keras. Pada tahun 2021, MRP melalui Pokja Agama menyatakan penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka peluang investasi industri alkohol di Papua, karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Investasi pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterlibatan aktif MRP dan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan investasi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan menghormati hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dan kearifan lokal. Sinergi antara pemerintah, MRP, dan masyarakat adat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Papua

REKOMENDASI

Investasi pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi luar biasa, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif MRP dan masyarakat adat sebagai penjaga warisan budaya dan alam Papua. Melalui Pelibatan Sejak Awal dalam Proses Perencanaan, Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat, Perlindungan Hak dan Kearifan Lokal, Kolaborasi Multistakeholder, Fokus pada Ekowisata dan Keunikan Papua maka akan terbangun Kolaborasi yang setara dan saling menghormati serta menghasilkan pembangunan pariwisata yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas dan kesejahteraan Orang Asli Papua. Wilayah Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan pendekatan berbasis keunikan lokal, pemanfaatan GIS, dan pelibatan masyarakat, pembangunan pariwisata tidak hanya akan berdampak ekonomi, tapi juga memperkuat identitas kultural dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta perlu bersinergi agar pengembangan ini adil, terukur, dan berorientasi jangka panjang.

REFERENSI

- Aminuddin, M. A., & Agussalim Burhanuddin. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 157–176. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607>.
- Kerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2000). Economics and Identity. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 715–753.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). *Effective community-based tourism: A best practice manual*. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre (STCRC).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- ANTARA News Papua. (2023). Wamendagri minta MRP terlibat aktif mengawal investasi di Papua. Diakses dari <https://papua.antaranews.com/berita/711609/wamendagri-minta-mrp-terlibat-aktif-mengawal-investasi-di-papua> Antara Papua.
- ANTARA News. (2024). Pemprov mengajak warga dukung pengembangan pariwisata di Papua. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4238451/pemprov-mengajak-warga-dukung-pengembangan-pariwisata-di-papua> Antara News.
- Bowles, S., & Gintis, H. (2002). Social capital and community governance. *The Economic Journal*, 112(483), F419–F436. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00077>.
- BPS. (2021). Jumlah Desa Tertinggal menurut Provinsi, 2019-2021. Jumlah Desa Tertinggal Menurut Provinsi (Desa), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MSMy/jumlah-desa-tertinggal-menurut-provinsi--desa-.html>.
- BPS Papua. (2023). *Papua dalam Angka*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Budiono, P., Sari, F. Y., Wulandari, C., & Tampubolon, N. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Lokal Di Kabupaten Raja Ampat, Papua. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*. <https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/RDJ/article/view/8777> Jurnal Unila.
- Cenderawasih Pos. (2024). Masyarakat Adat Tolak Merauke “digarap” Investor. Diakses dari <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/24/08/2024/masyarakat-adat-tolak-merauke-digarap-investor> Cenderawasih Pos.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and Commoditization in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386.
- DPR. (2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, 1, 1–40. <https://jdih.setkab.go.id/>.
- Detik News. (2024). Waka MPR Dorong Pengembangan Desa Wisata di Papua Selatan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7521363/waka-mpr-dorong-pengembangan-desa-wisata-di-papua-selatan> detiknews.
- Eskak, E. (2021). Desain souvenir khas Papua mendukung PON XX Papua 2021 serta bangkitnya pariwisata dan industri kreatif. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik (SNIKB)*, 3(1), 1–19. <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/107>.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Blackwell.
- Heliany. (2019). *Investasi Pariwisata Indonesia* (Issue January).
- Ismail, M. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua. *Matra Pembaruan*, 4(1), 59–69. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.59-69>.

- Iswari, H. R., & Anam, C. (2023). Penguatan Ketahanan UMKM pada Destinasi Community Based Tourism (CBT) Kampung Ekologi Kecamatan Temas Kota Batu. *Journal Community Service Consortium*, 3(1). <https://doi.org/10.37715/consortium.v3i1.3651>.
- JPNN Papua. (2023). Filep Wamafma: Investasi Penting, tetapi Jangan Memarginalkan Masyarakat Adat dan OAP. Diakses dari <https://papua.jpnn.com/papua-terkini/2471/filep-wamafma-investasi-penting-tetapi-jangan-memarginalkan-masyarakat-adat-dan-oaphttps://papua.jpnn.com>.
- Keraf, G. (2004). *Argumentasi dan narasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kleden, I. (2015). *Kebudayaan dan Identitas Lokal dalam Dinamika Pembangunan*. Jakarta: P3ES.
- Liputan6.com. (2024). Majelis Rakyat Papua Bertemu Jokowi, Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/5618290/majelis-rakyat-papua-bertemu-jokowi-usulkan-pemekaran-wilayah-mimikaliputan6.com>.
- Lewaherilla, N. C., Hanoeboen, B. R., & Payapo, R. W. (2023). Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Pariwisata Desa Sawai di Maluku Tengah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6). <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/13198IPM Journal>.
- Majelis Rakyat Papua. (2022). *Peran dan Fungsi Kultural MRP dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat*. Jayapura: Sekretariat MRP.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Pengembangan Desa Wisata di Papua Selatan sebuah Keniscayaan. Diakses dari <https://mpr.go.id/berita/Pengembangan-Desa-Wisata-di-Papua-Selatan-sebuah-Keniscayaanetiknews+2MPR RI+2MPR RI+2>.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pambudi, D. I., & Mulyo, J. H. (2021). "Pariwisata Berbasis Komunitas: Potensi, Tantangan dan Strategi". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(1), 55–63.
- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- Pambudi, D. I., & Mulyo, J. H. (2021). Pariwisata berbasis komunitas: Potensi, tantangan dan strategi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(1), 55–63.
- Putra, P. Y., & Arifin, A. (2020). Pemberdayaan UMKM Papua melalui pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(3), 120–135.
- RM.id. (2024). Terima Majelis Rakyat Papua, Bamsuet Terima Aspirasi Usulan Perubahan UU Otsus. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/parlemen/222332/terima-majelis-rakyat-papua-bamsuet-terima-aspirasi-usulan-perubahan-uu-otsus>.
- Saweri, David, dkk. (2023). *Potret Hutan Papua: Ayunan Tokok Sagu Terimpit Kebun Sawit*. August, 9.
- Sitorus, B. (2020). "Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Timur", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 112–126.
- Suara Papua. (2024). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat Papua untuk Pembangunan Berkelanjutan. Diakses dari <https://suarapapuanews.com/2024/08/07/sinergi-pemerintah-dan-masyarakat-adat-papua-untuk-pembangunan-berkelanjutan/Suara Papua News>.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST.

- Sriwijaya, R. R. A., Laroza, C., Sutanto, V., & Ramadhani, M. F. (2024). Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Penggerak Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal: Strategi Pembangunan Ekowisata Bahari di Pulau Liki, Papua. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 2(1), 128–141.
- Triyanti, R., Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Febrian, T. (2020). Potensi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat Adat Sebagai Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kampung Malaumkarta, Papua Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v1i1.8239>.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1981). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.
- Tampubolon, N., & Sauyai, L. M. (2023). Pengembangan Atraksi Wisata Berbasis Sumber Daya Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Kampung Wisata Yenbuba, Raja Ampat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/6246Journal+Nusantara+1Jurnal+Unila+1>.
- Tirto.id. (2021). Majelis Rakyat Papua Tolak Industri Miras di Tanah Papua. Diakses dari <https://tirto.id/majelis-rakyat-papua-tolak-industri-miras-di-tanah-papua-gaJRtirto.id>.
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2008). *Tourism and Development in the Developing World*. Routledge.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDRIP. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. United Nations General Assembly.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Wibawa, M. I., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Kewirausahaan Terhadap Kualitas Destinasi Wisata Pura Taman Ayun. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, ISSN : 233, 1667. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p07>.
- Wise, S. M. (2016). *Geographic Information System (GIS). The Dictionary of Physical Geography, Fourth Edition*, 5(2), 234–235.
- Woltjer, J. (2014). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2014.25.1.1>.
- Woltjer, J. (2014). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2014.25.1.1>.

- Wise, S. M. (2016). Geographic Information System (GIS). *The Dictionary of Physical Geography*, 5(2), 234–235.
- Wibawa, M. I., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Kewirausahaan Terhadap Kualitas Destinasi Wisata Pura Taman Ayun. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1667–1694. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p07>.
- Wororik, J. R., & Bhaskara, G. I. (2022). Implementasi Konsep Community Based Tourism Pada Daya Tarik Wisata Religi Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 10(1), 81-85. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2022.v10.i01.p10>Open Journal Systems+1Jurnal Harian Regional+1.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.